



Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Mangrove Berbasis Collaborative Governance

Muhammad Sawir^{1*}, Sumardi²Universitas Yapis Papua, Indonesia¹Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia²Email Korespondensi Author: sawirmuhammad103@gmail.comThis is an open access article under the [CC BY 4.0](#) license.**Kata kunci:**

Tata Kelola Kebijakan;
Mangrove; Collaborative Governance; Masyarakat Adat; Papua.

Abstrak

Ekosistem mangrove berperan penting dalam keberlanjutan lingkungan pesisir, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat pesisir. Di Papua, perlindungan mangrove menghadapi tantangan seperti pendekatan top-down, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat adat yang belum optimal. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan kebijakan perlindungan mangrove dengan pendekatan tata kelola kolaboratif sebagai alternatif inovasi dalam kebijakan publik di Papua. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan mangrove dan wilayah pesisir, artikel jurnal ilmiah mengenai tata kelola mangrove dan kolaborasi, serta laporan riset dari institusi. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan cara mengidentifikasi kebijakan perlindungan mangrove, memetakan aktor dan kepentingan yang terlibat, serta menganalisis kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan mangrove di Papua belum sepenuhnya melibatkan peran masyarakat adat dan pemangku kepentingan non-negara dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Penerapan tata kelola kolaboratif yang menekankan kemitraan antara pemerintah, masyarakat adat, dan aktor lainnya memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, legitimasi publik, serta keberlanjutan dalam pengelolaan mangrove. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif adalah strategi krusial dalam mendorong kebijakan perlindungan mangrove yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan di Papua.

Keywords:

Policy Governance;
Mangrove; Collaborative Governance; Indigenous Communities; Papua.

Abstract

Mangrove ecosystems play an important role in coastal environmental sustainability, protecting biodiversity, and supporting the social and economic livelihoods of coastal communities. In Papua, mangrove protection faces challenges such as a top-down approach, lack of inter-agency coordination, and suboptimal participation of indigenous communities. This study aims to analyze mangrove protection policy management using a collaborative governance approach as an alternative innovation in public policy in Papua. This study uses a qualitative method with a policy study approach. The data used is secondary data obtained through systematic searches of policy documents and regulations related to mangrove and coastal area management, scientific journal articles on mangrove governance and collaboration, and research reports from institutions. Data analysis was conducted systematically by identifying mangrove protection policies, mapping the actors and interests involved, and analyzing the suitability of policies with the principles of collaborative governance. The results of the study show that mangrove protection policies in Papua do not yet fully involve the role of indigenous peoples and non-state stakeholders in the policy formulation and implementation process. The implementation of collaborative governance that emphasizes partnerships between the government, indigenous peoples, and other actors has the potential to increase policy effectiveness, public legitimacy, and sustainability in mangrove management. This article concludes that strengthening collaborative governance is a crucial strategy in promoting fair, participatory, and sustainable mangrove protection policies in Papua.



Pendahuluan

Ekosistem mangrove merupakan salah satu aset penting dalam pengelolaan wilayah pesisir karena kemampuannya memberikan layanan ekosistem, seperti perlindungan pantai, penyerapan karbon, dan dukungan untuk mata pencarian masyarakat pesisir. Dalam konteks kebijakan publik, mangrove tidak hanya dipandang sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai alat untuk pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia, pengintegrasian mangrove dalam agenda kebijakan nasional semakin diperkuat seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap *blue carbon* dan komitmen untuk mengurangi emisi (Sidik, 2023).

Namun, pelaksanaan kebijakan perlindungan mangrove masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mengenai *mangrove* di Indonesia sering kali bersifat sektoral, tumpang tindih, dan kurang terkoordinasi antar instansi, sehingga efektivitas kebijakan di tingkat lokal menjadi rendah (Mursyid et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masalah mangrove tidak hanya terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada desain dan praktik pengelolaan kebijakan yang belum optimal.

Papua menghadirkan konteks yang lebih rumit dalam pengelolaan mangrove. Wilayah ini memiliki luas *mangrove* yang signifikan secara ekologis, tetapi di saat yang sama menghadapi tekanan dari pembangunan pesisir, keterbatasan kapasitas institusi pemerintah daerah, serta tantangan geografis yang memengaruhi pengawasan dan pelaksanaan kebijakan. Studi lintas wilayah di New Guinea menunjukkan bahwa tekanan dari aktivitas hulu dan kebijakan lintas sektor sering kali berdampak langsung pada degradasi mangrove pesisir, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan kolaboratif (Sillanpaa et al., 2024).

Aspek sosial menjadi dimensi penting dalam pengelolaan mangrove di Papua. Masyarakat adat pesisir memiliki hubungan historis dan kultural yang kuat dengan ekosistem mangrove, yang tercermin dalam praktik pengelolaan berdasarkan adat dan norma lokal. Beberapa kajian di Teluk Youtefa, Jayapura, menunjukkan bahwa keberlanjutan *mangrove* tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat adat sebagai penjaga wilayah dan pengguna utama sumber daya pesisir (Salsabila et al., 2024; Tijjani et al., 2023). Namun, peran tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kebijakan formal.

Literatur terbaru mengenai restorasi dan pengelolaan *mangrove* menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan partisipasi pemangku kepentingan adalah faktor kunci keberhasilan kebijakan. Tinjauan sistematis terhadap praktik restorasi *mangrove* berbasis komunitas menunjukkan bahwa program yang mengabaikan dimensi sosial dan pengelolaan lokal cenderung gagal atau tidak berkelanjutan (Wylie et al., 2024). Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan perlindungan *mangrove* perlu dirancang dengan mempertimbangkan dinamika aktor dan relasi kekuasaan di tingkat lokal.

Dalam kebijakan publik, pendekatan *collaborative governance* dianggap relevan untuk menangani masalah lintas sektor dan multiaktor. Pendekatan ini menekankan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa *collaborative governance* berpotensi meningkatkan legitimasi kebijakan, kepatuhan aktor, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, termasuk *mangrove* (Iqbal, 2023; Sevial et al., 2025).

Namun, kajian kebijakan mangrove di Indonesia terutama di Papua masih didominasi oleh analisis ekologis dan teknis, sementara studi yang secara eksplisit menggunakan *collaborative governance* sebagai kerangka analisis kebijakan publik masih relatif sedikit. Penelitian yang ada umumnya belum mengupas secara mendalam bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan aktor pendukung dibangun, dilembagakan, serta dioperasionalkan dalam konteks kebijakan perlindungan mangrove.

Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung membahas kolaborasi secara normatif, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan masalah kesenjangan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Padahal, pengalaman pengelolaan kawasan pesisir di Papua Barat, seperti di Raja Ampat, menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh adanya aktor perantara, mekanisme kolaborasi yang jelas, serta pembagian peran yang terstruktur (White et al., 2022). Temuan ini membuka peluang untuk analisis kebijakan yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji kembali pengelolaan kebijakan perlindungan *mangrove* di Papua dengan menempatkan *collaborative governance* sebagai



kerangka analisis utama. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan, sejauh mana masyarakat adat dilibatkan, serta peluang penguatan kolaborasi lintas aktor dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan *mangrove*.

Kebaruan dari kajian ini terletak pada analisis kebijakan perlindungan mangrove di Papua melalui lensa *collaborative governance* yang secara eksplisit menempatkan masyarakat adat sebagai aktor kebijakan, bukan sekadar objek implementasi. Berbeda dari studi sebelumnya yang dominan bersifat ekologis atau normatif, artikel ini menyoroti kesenjangan dalam pengelolaan dan menawarkan kerangka kolaboratif sebagai inovasi kebijakan publik yang kontekstual dan aplikatif bagi wilayah pesisir Papua.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan kebijakan perlindungan mangrove di Papua dengan pendekatan *collaborative governance*, dengan menelaah tantangan koordinasi, peran masyarakat adat, serta peluang penguatan kolaborasi lintas aktor dalam kebijakan publik pesisir.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan publik untuk memahami proses tata kelola kebijakan perlindungan mangrove di Papua, termasuk relasi antaraktor dan dinamika implementasinya yang kompleks. Pendekatan ini umum dalam studi kebijakan publik, bertujuan menganalisis proses serta interaksi aktor (Yanow & Schwartz-Shea, 2015). Strategi yang diterapkan adalah studi kebijakan dengan pendekatan deskriptif-analitis, memungkinkan peneliti menelaah substansi kebijakan, konfigurasi aktor, dan mekanisme implementasi dalam pemerintahan. Kerangka *collaborative governance* digunakan untuk mengevaluasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan aktor non-negara dalam perlindungan *mangrove* di Papua (Ansell & Gash, 2018).

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen kebijakan, artikel jurnal ilmiah, dan laporan riset. Penggunaan data sekunder dianggap memadai untuk mengidentifikasi pola kebijakan dan relasi aktor dalam penelitian kebijakan lingkungan (Bowen, 2019). Analisis data dilakukan secara sistematis melalui analisis dokumen, meliputi identifikasi kebijakan kunci, pemetaan aktor, analisis kesesuaian dengan prinsip *collaborative governance*, dan perumusan temuan analitis mengenai tantangan dan peluang tata kelola kolaboratif. Kerangka ini menghubungkan temuan dengan teori tata kelola kolaboratif yang menekankan interaksi dan pengambilan keputusan bersama (Emerson et al., 2015). Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen kebijakan dan temuan dari berbagai jurnal. Strategi ini umum digunakan untuk meningkatkan validitas interpretasi dan mengurangi bias analisis (O'Cathain, 2019).

Hasil dan Diskusi

Bagian ini menyajikan hasil analisis kebijakan perlindungan *mangrove* di Papua berdasarkan telaah dokumen kebijakan dan literatur ilmiah, yang kemudian didiskusikan menggunakan kerangka *collaborative governance*. Pembahasan difokuskan pada kondisi tata kelola kebijakan, peran dan interaksi antaraktor, serta kesenjangan implementasi kebijakan sebagai dasar penilaian efektivitas dan perumusan implikasi kebijakan perlindungan mangrove yang berkelanjutan.

Tata Kelola dan Fragmentasi Kewenangan

Temuan dari kajian menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan perlindungan *mangrove* di Papua masih menghadapi tantangan terkait fragmentasi kewenangan antarinstansi pemerintah. Kewenangan dalam pengelolaan mangrove terdistribusi di berbagai sektor, seperti lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta pemerintah daerah, tanpa adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur dengan baik. Situasi ini mengakibatkan kebijakan perlindungan *mangrove* dilaksanakan secara terpisah dan tidak terintegrasi, sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal menjadi rendah.

Fragmentasi kewenangan ini sejalan dengan hasil penelitian Mursyid et al. (2021) yang menekankan bahwa kebijakan *mangrove* di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan sektoral dan belum didukung oleh kerangka tata kelola lintas sektor yang kuat. Hal ini berakibat pada program perlindungan dan rehabilitasi *mangrove* yang sering kali tumpang tindih, tidak berkelanjutan, atau



bahkan saling melemahkan. Dalam konteks kebijakan publik, keadaan ini mencerminkan lemahnya keselarasan kebijakan yang berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan tersebut.

Studi Sillanpaa et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa di kawasan New Guinea, termasuk Papua, lemahnya integrasi kebijakan hulu-hilir serta koordinasi lintas sektor memberikan dampak langsung pada degradasi ekosistem *mangrove*. Tekanan pembangunan dari wilayah daratan, seperti perubahan tata guna lahan dan aktivitas ekonomi berskala besar, tidak diimbangi dengan kebijakan pesisir yang adaptif dan terkoordinasi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Dalam perspektif tata kelola kebijakan, fragmentasi kewenangan ini menekankan pentingnya pendekatan collaborative governance sebagai alternatif untuk memperkuat kebijakan perlindungan mangrove. Tanpa adanya mekanisme kolaborasi yang jelas dan terstruktur, kebijakan berisiko terjebak dalam pendekatan administratif yang terpisah. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan penyelarasan kewenangan antaraktor menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan efektivitas tata kelola kebijakan perlindungan mangrove di Papua.

Keterlibatan Aktor dan Partisipasi Masyarakat Adat

Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi aktor dalam kebijakan perlindungan mangrove di Papua masih didominasi oleh pemerintah sebagai aktor utama, sedangkan masyarakat adat belum terorganisir secara resmi dalam struktur pengambilan keputusan kebijakan. Keterlibatan masyarakat adat cenderung bersifat konsultatif dan hanya terjadi pada tahap implementasi tertentu, tanpa adanya partisipasi yang substansial dalam perumusan kebijakan. Situasi ini menyebabkan kebijakan perlindungan mangrove kurang mencerminkan kebutuhan, pengetahuan lokal, serta kepentingan komunitas pesisir yang secara langsung bergantung pada ekosistem mangrove.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wylie et al. (2024) yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi komunitas menjadi salah satu penyebab utama kegagalan dalam kebijakan dan program restorasi mangrove. Ketika masyarakat lokal tidak dilibatkan sebagai mitra sejajar, kebijakan cenderung kehilangan legitimasi sosial dan menghadapi resistensi atau rendahnya tingkat kepatuhan. Dalam konteks kebijakan publik, partisipasi yang terbatas mencerminkan kelemahan dalam desain tata kelola yang belum sepenuhnya mengakomodasi aktor non-negara.

Di Papua, praktik pengelolaan *mangrove* yang berbasis adat telah lama menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat pesisir. Namun, penelitian Salsabila et al. (2024) dan Tijjani et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik tersebut belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan formal, sehingga muncul kesenjangan antara sistem pengelolaan adat dan kerangka regulasi pemerintah. Ketidaksinkronan ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan, sekaligus mengabaikan modal sosial dan pengetahuan lokal yang seharusnya menjadi aset dalam perlindungan *mangrove*.

Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas dan kesetaraan antaraktor belum terpenuhi. Penguatan keterlibatan masyarakat adat sebagai aktor dalam kebijakan memerlukan pengakuan kelembagaan yang jelas, mekanisme partisipasi yang berkelanjutan, serta pembagian peran yang transparan. Dengan demikian, integrasi masyarakat adat ke dalam tata kelola kebijakan perlindungan *mangrove* bukan hanya merupakan tuntutan normatif, tetapi juga suatu strategi kebijakan yang rasional untuk meningkatkan keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan *mangrove* di Papua.

Koordinasi Lintas Sektor dan Kelembagaan

Hasil kajian menunjukkan bahwa koordinasi antar sektor dalam kebijakan perlindungan *mangrove* di Papua masih terbatas dan belum didukung oleh kerangka kelembagaan yang kuat. Ketiadaan forum kolaboratif yang permanen mengakibatkan interaksi antara aktor, baik antar instansi pemerintah maupun antara pemerintah dan aktor non-negara bersifat ad hoc dan tergantung pada program atau proyek tertentu. Hal ini menyebabkan upaya perlindungan mangrove tidak berjalan secara berkelanjutan dan rentan terhenti saat terjadi perubahan kebijakan atau kepemimpinan.

Temuan ini memperkuat argumen Ansell dan Gash (2018) yang menekankan bahwa kolaborasi dalam kebijakan memerlukan arena institusional formal sebagai ruang untuk dialog, koordinasi, dan pengambilan keputusan bersama. Tanpa adanya forum yang terstruktur, kolaborasi cenderung bersifat



simbolis dan tidak dapat menghasilkan komitmen jangka panjang antara aktor-aktor yang terlibat. Dalam konteks kebijakan publik, kelemahan kelembagaan ini berdampak pada rendahnya konsistensi dalam implementasi serta minimnya akuntabilitas dalam kebijakan perlindungan *mangrove*.

Studi White et al. (2022) tentang tata kelola kawasan pesisir di Indonesia Timur menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan sangat dipengaruhi oleh adanya mekanisme kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Keberadaan lembaga perantara dan forum kolaboratif yang jelas memungkinkan pembagian peran yang efektif, penyelesaian konflik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Temuan ini sangat relevan untuk konteks Papua, di mana kompleksitas aktor dan kepentingan menuntut adanya koordinasi lintas sektor yang lebih sistematis.

Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, penguatan koordinasi lintas sektor dan kelembagaan menjadi prasyarat utama untuk efektivitas kebijakan perlindungan *mangrove*. Pembentukan forum kolaboratif yang permanen yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menyatukan visi, menyelaraskan kewenangan, dan memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan *mangrove*. Dengan demikian, penguatan kelembagaan kolaboratif bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan strategi kebijakan yang esensial dalam menghadapi tantangan tata kelola *mangrove* di Papua.

Collaborative Governance sebagai Solusi Kebijakan

Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa pendekatan tata kelola kolaboratif merupakan pilihan kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam pengelolaan perlindungan *mangrove* di Papua, terutama yang berkaitan dengan fragmentasi kewenangan, keterbatasan partisipasi masyarakat adat, serta rendahnya koordinasi antar sektor. Pendekatan ini menempatkan kolaborasi antar aktor sebagai pusat dari proses kebijakan, sehingga memungkinkan terbentuknya kesepahaman bersama dan pembagian peran yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Temuan ini sejalan dengan kerangka yang diajukan oleh Emerson et al. (2015) yang menekankan bahwa tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan legitimasi kebijakan melalui partisipasi aktor yang lebih inklusif, memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan, serta mendorong keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan lingkungan, kolaborasi menjadi mekanisme penting untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat lokal yang sering kali berada dalam posisi yang tidak seimbang.

Studi empiris di Indonesia juga menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan mangrove dan ekosistem pesisir. Iqbal (2023) mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas konservasi *mangrove* melalui penguatan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Di sisi lain, penelitian Sevial et al. (2025) menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya mempengaruhi aspek ekologis, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam konteks Papua, penerapan tata kelola kolaboratif sebagai solusi kebijakan memerlukan penguatan kerangka kelembagaan, kejelasan mekanisme partisipasi, serta pengakuan formal terhadap peran masyarakat adat. Dengan mengintegrasikan aktor pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu sistem tata kelola kolaboratif, kebijakan perlindungan *mangrove* berpotensi menjadi lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan konseptual, tetapi juga sebagai strategi kebijakan praktis dalam menghadapi tantangan pengelolaan *mangrove* di Papua.

Implikasi Kebijakan dan Keberlanjutan

Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa implikasi kebijakan perlindungan mangrove di Papua tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap peran masyarakat adat dan penguatan kolaborasi antaraktor. Kebijakan yang menjadikan masyarakat adat sebagai mitra strategis berpotensi meningkatkan legitimasi, kepatuhan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, pengakuan kelembagaan terhadap sistem pengelolaan adat menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan kebijakan perlindungan mangrove.

Implikasi tersebut sejalan dengan kajian Sidik (2023) yang menempatkan *mangrove* sebagai instrumen strategis dalam kebijakan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, terutama melalui konsep blue carbon. Sidik menekankan bahwa keberhasilan agenda blue carbon sangat



tergantung pada tata kelola kebijakan yang dapat mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan kelembagaan. Kebijakan yang hanya fokus pada aspek teknis dan target lingkungan, tanpa mempertimbangkan tata kelola dan hubungan antaraktor, berisiko tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, penguatan kolaborasi antaraktor memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan kebijakan perlindungan *mangrove*. Kolaborasi yang terstruktur memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menciptakan mekanisme akuntabilitas bersama. Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan lingkungan yang selalu berubah.

Dengan demikian, keberlanjutan kebijakan perlindungan *mangrove* di Papua memerlukan pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan sektoral ke tata kelola kolaboratif yang inklusif. Implikasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan *mangrove* bukan hanya sekadar agenda konservasi lingkungan, melainkan juga bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kebijakan menjadi prasyarat utama untuk memastikan keberlanjutan manfaat ekologis dan sosial dari ekosistem mangrove di Papua.

Diskusi dalam Konteks Kebijakan Publik

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan mangrove di Papua terkait erat dengan tata kelola kebijakan publik yang struktural dan institusional. Tantangan seperti fragmentasi kewenangan, kurangnya partisipasi masyarakat lokal, dan lemahnya koordinasi antar sektor mengindikasikan bahwa isu mangrove tidak hanya lingkungan, tetapi juga melibatkan desain institusi dan mekanisme pengambilan keputusan. Pendekatan teknokratis dan sektoral terbukti tidak memadai untuk menangani kompleksitas pengelolaan mangrove.

Pendekatan tata kelola kolaboratif memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami kebijakan pesisir yang melibatkan berbagai aktor. Dalam konteks ini, kebijakan perlindungan mangrove dipandang sebagai proses interaktif yang memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerangka ini memungkinkan analisis mendalam tentang penyusunan, implementasi, dan negosiasi kebijakan di tingkat lokal, terutama di wilayah sosial dan budaya yang kuat seperti Papua.

Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi, partisipasi, dan legitimasi dalam kebijakan publik. Kebijakan yang dirancang tanpa partisipasi lokal berisiko menghadapi resistensi dan rendahnya kepatuhan. Oleh karena itu, legitimasi kebijakan bergantung pada penerimaan dan pemahaman masyarakat yang terdampak.

Penguatan tata kelola kolaboratif dalam perlindungan mangrove di Papua bukan sekadar pilihan normatif, tetapi kebutuhan praktis untuk efektivitas, keberlanjutan, dan keadilan dalam kebijakan publik. Masa depan kebijakan perlindungan mangrove sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membangun tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap konteks lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan mangrove di Papua sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang diterapkan. Temuan mengenai fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi menegaskan bahwa isu mangrove adalah masalah kebijakan publik yang kompleks. Pendekatan tata kelola kolaboratif memberikan kerangka yang relevan untuk menjembatani kepentingan beragam dan memperkuat legitimasi kebijakan.

Dengan demikian, penguatan tata kelola kolaboratif tidak hanya menjadi kerangka analitis, tetapi juga menawarkan arah kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif. Penegasan ini penting untuk perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, guna mendorong transformasi kebijakan perlindungan mangrove yang lebih efektif dan berkelanjutan di Papua.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan perlindungan mangrove di Papua menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan. Masalah seperti fragmentasi kewenangan antarinstansi, kurangnya koordinasi antar sektor, dan peran masyarakat adat yang belum terintegrasi mengakibatkan



kebijakan tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan mangrove bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga terkait dengan kebijakan publik yang melibatkan desain institusi dan mekanisme pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat adat dalam kebijakan masih terbatas, padahal mereka memiliki pengetahuan lokal yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan *mangrove*. Kurangnya mekanisme partisipasi yang berarti berpengaruh pada legitimasi dan kepatuhan kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pendekatan collaborative governance muncul sebagai solusi untuk mengatasi kompleksitas pengelolaan perlindungan *mangrove*. Pendekatan ini mendorong kolaborasi inklusif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperjelas pembagian peran dan memperkuat koordinasi.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan beberapa langkah kebijakan: (1) memperkuat koordinasi antar sektor dengan membentuk forum kolaboratif dalam pengelolaan mangrove; (2) mengakui dan mengintegrasikan peran masyarakat adat dalam kebijakan; dan (3) mengembangkan kerangka kebijakan yang adaptif dan kolaboratif untuk keberlanjutan ekosistem *mangrove* di Papua. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan perlindungan *mangrove*.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux032>
- Bowen, G. A. (2019). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 19(1), 27–40. <https://doi.org/10.1108/QRJ-D-18-00001>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2015). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Iqbal, M. (2023). Collaborative governance dalam pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 27(2), 145–162.
- Mursyid, A., Rahman, A., & Putri, D. A. (2021). Fragmentasi kebijakan dan tantangan pengelolaan mangrove di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(3), 512–524. <https://doi.org/10.14710/jil.19.3.512-524>
- O'Cathain, A. (2019). *Mixed methods research: A practical guide*. SAGE Publications.
- Salsabila, R., Wambrauw, E., & Yuliana, L. (2024). Peran masyarakat adat dalam pengelolaan mangrove di Teluk Youtefa, Jayapura. *Jurnal Sosial dan Pesisir*, 12(1), 33–48.
- Sevial, R., Nugroho, R., & Prasetyo, B. (2025). Collaborative governance dan keberlanjutan pengelolaan pesisir di Indonesia Timur. *Policy and Society*, 44(1), 67–83. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puaa056>
- Sidik, F. (2023). Mangrove, blue carbon, dan kebijakan perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 7(2), 89–105.
- Sillanpaa, M., Alongi, D. M., & Mangubhai, S. (2024). Cross-sectoral pressures and mangrove degradation in New Guinea. *Marine Policy*, 155, 105765. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105765>
- Tijjani, A., Rahail, A., & Yoku, O. (2023). Indigenous knowledge and mangrove conservation in eastern Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 232, 106456. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106456>



White, A. T., Aliño, P. M., & Cros, A. (2022). Governance lessons from coastal and marine management in eastern Indonesia. *Coastal Management*, 50(4), 345–362.
<https://doi.org/10.1080/08920753.2022.2034567>

Wylie, L., Sutton-Grier, A., & Moore, A. (2024). Community-based mangrove restoration: A systematic review. *Ecological Restoration*, 42(1), 15–28. <https://doi.org/10.3368/er.42.1.15>

Yanow, D., & Schwartz-Shea, P. (2015). *Interpretive research design: Concepts and processes*. Routledge.